

## **MEMBANGUN DAN MEMPERERAT HUBUNGAN BILATERAL MALAYSIA DAN INDONESIA MELALUI KERJASAMA PENDIDIKAN**

Wasis Susetio, Rizka Amelia Azis, Horadin Saragih, Anna Bertha  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510  
wasis.susetio@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*This research aims to analyze efforts to build and strengthen bilateral relations between Malaysia and Indonesia through educational cooperation. In the era of globalization, education has become one of the pillars in strengthening relations between countries. The method used in this research is literature study and qualitative analysis of various cooperation programs that have been implemented, including exchanges of students, lecturers, teachers, and professors, as well as internship and training programs. The results of the research indicate that educational cooperation between the two countries not only improves the quality of education but also strengthens social and cultural ties. The involvement of the government, the Indonesian diaspora in Malaysia, and educational institutions are factors in the success of this program. This research concludes that effective collaboration in the field of education can provide a significant positive impact on the communities of both countries, as well as support the development of competitive human resources on the international stage.*

**Keywords :** *Education Cooperation, Bilateral Relations, Indonesia, Malaysia, Human Resource Development* Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun dan mempererat hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia melalui kerjasama pendidikan. Dalam era globalisasi, pendidikan menjadi salah satu pilar dalam memperkuat hubungan antar negara. Metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah studi literatur dan analisis kualitatif terhadap berbagai program kerjasama yang telah dilaksanakan, termasuk pertukaran siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, serta program magang dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pendidikan antara kedua negara bukan sekedar meningkatkan mutu pendidikan, namun juga memperkuat hubungan sosial dan budaya. Keterlibatan pemerintah, diaspora Indonesia di Malaysia, dan lembaga pendidikan menjadi faktor dalam keberhasilan program ini. Kesimpulan penelitian ini bahwa kolaborasi yang efektif dalam bidang pendidikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat kedua negara, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif di kancah internasional.

**Kata Kunci:** Kerjasama Pendidikan, Hubungan Bilateral, Indonesia, Malaysia, Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### **Pendahuluan**

Dosen perguruan tinggi memiliki Tridharma yang mencakup pengabdian kepada masyarakat (PKM). Untuk melaksanakan kegiatan PKM, dosen memastikan bahwa keahlian dan bidang yang digelutinya sesuai. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dengan mempelajari dan memanfaatkan layanan pemerintah atau dengan memperhatikan dan menangani masalah-masalah sosial.

Salah satu tanggung jawab dosen yang ingin membawa perubahan bagi bangsanya adalah dengan melakukan PKM. Tri Dharma Perguruan Tinggi memasukkan PKM sebagai salah satu prinsipnya. Dharma ini berupaya

menghapus keterpisahan dunia akademis dari kepentingan masyarakat dan mengikutsertakan pendidikan tinggi dalam pembangunan. Lebih jauh, masyarakat juga akan memperoleh sumber daya untuk mengatasi masalah dan mengatasi hambatan.

Mendidik seseorang berarti melakukan upaya yang disengaja untuk menyediakan lingkungan dan proses pembelajaran yang mereka butuhkan untuk tumbuh secara spiritual, religius, pribadi, intelektual, moral, dan sosial.

Memastikan setiap orang mendapat kesempatan yang adil untuk memperoleh pengetahuan adalah salah satu tugas negara terhadap penduduknya. Standar pendidikan dapat ditingkatkan melalui kerja sama

internasional maupun inisiatif dalam negeri. Dalam hal pendidikan, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan bilateral yang bertujuan untuk meningkatkan standar.

Kerja sama di bidang pendidikan diperlukan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di panggung global dengan belajar dari dan meniru praktik negara-negara dengan sistem pendidikan yang unggul. Pemerintah Indonesia dan Malaysia mengambil langkah positif dengan meningkatkan kerja sama mereka di bidang pendidikan. Ini akan membantu meningkatkan standar pendidikan di kedua negara dan memastikan bahwa semua orang Indonesia dapat dengan mudah belajar di luar negeri.

Kolaborasi seperti ini berdampak positif pada hubungan kedua negara, yang menjadi pertanda baik bagi upaya masa depan untuk meningkatkan standar pendidikan melalui pertukaran pengetahuan. Melalui kemitraan ini, Indonesia dan Malaysia berpotensi meluncurkan sejumlah program yang akan menguntungkan kedua negara dalam hal ekonomi, pertukaran budaya, kesempatan pendidikan, dan tempat wisata.

Diaspora Indonesia di Malaysia merupakan bagian integral hubungan Indonesia-Malaysia. Peran diaspora Indonesia mempunyai arti penting dalam membangun ikatan persaudaraan bangsa serumpun yang mempunyai kepentingan bersama di wilayah regional ASEAN sehingga pada gilirannya akan membangun kesejahteraan di negara masing-masing. Dengan demikian, hal ini juga akan mempengaruhi Kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dan Malaysia terutama dibidang Pembangunan kesejahteraan kedua negara.

PKM ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman, sosialisasi dan pemahaman tentang perlunya membangun dan mempererat hubungan bilateral malaysia dan indonesia melalui kerjasama pendidikan.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dilakukan dengan seminar yang diadakan oleh Dosen dan Mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, STIHPADA Palembang dan Fakultas Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia dengan peserta dari Perwakilan

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia-UKM. Acara ini diselenggarakan di Ballroom Royal Park Hotel, Uniten, Bangi, Malaysia pada Hari Jumat, 22 November 2024.

Acara dibuka dengan sambutan dari Perwakilan STIHPADA Assist. Prof. Dr. Evi Oktarina, S.H., M.H. sebagai Ka.Prodi S1 dan Dr. Wasis Susetio dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Sebagai Pembicara dalam acara ini yaitu, Prof. Dr. Salawati Binti Mat Basir perwakilan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia (Pakar Hukum Internasional), Assist. Prof. Dr. Dra. Hj. Erleni, S.H., M.H Wakil Ketua I STIHPADA Palembang, dan Ratna Yunita Setiani, S, Psi., M.Psi. Perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia – UKM dan difasilitasi oleh Dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, STIHPADA Palembang dan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sebagai bagian dari proses kegiatan PKM ini, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Langkah perencanaan, yaitu dengan pembuatan proposal serta undangan kepada narasumber dan peserta diaspora Malaysia;
2. Langkah penerapan, yaitu dengan melangsungkan kegiatan atau acara seminar. Langkah ini diselesaikan dalam dua kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, narasumber memberikan ceramah dan peserta bersosialisasi; pada pertemuan kedua, peserta mengajukan dan menjawab pertanyaan.
3. Menyusun laporan dan artikel.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dalam pembukaan kegiatan PKM ini, Dr. Wasis Susetio dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sebagai fasilitator PKM, menegaskan jika Pembukaan UUD 1945 menyebutkan pendidikan sebagai salah satu tujuan negara. Layanan pendidikan formal yang disediakan oleh sekolah merupakan salah satu dari beberapa inisiatif pendidikan yang menurutnya dapat membantu mewujudkan tujuan ini. Pasalnya, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan hak dasar atas pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya bagi warga negaranya.

Karena pendidikan pada hakikatnya berkaitan dengan manusia, maka hakikat manusia itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari inti atau hakikat Pendidikan (Suardi, 2016).

Dalam UUD 1945 bagian 31 Bab XIII butir (1) berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang mempunyai hak yang hakiki dan tidak dapat dicabut untuk memperoleh pendidikan" Pada butir (2) Pendidikan dasar diamanatkan bagi semua warga negara dan pemerintah berkewajiban menanggung biayanya. Butir (3) Pemerintah seharusnya sedang merencanakan dan melaksanakan sistem sekolah nasional yang mencerdaskan warga negara serta meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Ketentuan serupa juga ada pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memaparkan jika negara wajib menjamin semua warga negara, baik yang berdomisili di internal maupun eksternal wilayah NKRI, untuk mengikuti program wajib belajar sembilan tahun.

Program Indonesia Pintar yang didukung oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan menengah universal atau program percontohan wajib belajar dua belas tahun. Hal ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Mendikbud No. 19 Tahun 2016 (Ghofar, 2015).

Pandangan Kementerian Kerajaan Malaysia, penduduk Malaysia wajib menyelesaikan 11 tahun pendidikan wajib, dengan 6 tahun untuk sekolah dasar dan 5 tahun untuk pendidikan menengah. Setiap siswa di kelas tujuh hingga dua belas harus menyelesaikan kurikulum dasar ini. Murid sekolah dasar dan menengah adalah kelompok terakhir. Semua warga negara dan penduduk tetap Malaysia, termasuk mereka yang berada di Sabah, memiliki akses ke pendidikan publik yang didanai oleh pemerintah federal. Sekolah umum terbuka untuk semua warga negara dan menyediakan berbagai kesempatan pendidikan.

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang luas yang mencakup banyak aspek yang berbeda, salah satunya adalah kebutuhan untuk menumbuhkan lebih banyak kolaborasi antara kedua negara sebagai langkah strategis. Berkolaborasi untuk mengatasi masalah pendidikan adalah salah satunya.

Sejak jauh sebelum kedua negara memperoleh kemerdekaannya, Indonesia dan

Malaysia telah bekerja sama dengan erat. Ikatan yang kuat ini berasal dari sejumlah karakteristik bersama, termasuk sejarah bersama, leluhur yang sama, dan cita-cita bersama dari para pendiri kedua negara, di antaranya adalah sesama anggota ASEAN (Cipto, 2007)

Karena kesamaan budaya serta sikap Indonesia yang bebas dan aktif, hubungan antara Malaysia dan Indonesia cukup dekat dan akrab. Meskipun terjadi ketegangan antara kedua negara dari tahun 1963 hingga 1965, para pemimpin mereka yang berpikiran maju dengan cepat memulihkan hubungan dan terus memainkan peran perintis dalam pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 1967, di Bangkok (Maksum, 2017)

Program pertukaran, kesempatan beasiswa, dan perjanjian visa merupakan contoh-contoh cara kerja sama kedua negara sejak tahun 1970-an. Di bidang pendidikan, kemitraan ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman (MoU) sebelumnya yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1998. Perjanjian ini mengatur bentuk-bentuk kerja sama berikut: pertukaran staf antara Mendikbud RI dan Malaysia, pertukaran pelajar, program beasiswa, pertukaran pakar, pertukaran publikasi, pertukaran lembaga pelatihan, bantuan vokasi dan teknis, peninjauan kursus dan transfer kredit, penemuan bahan penelitian, alat peraga, dokumentasi, dan alat peraga pendidikan yang terkait, serta penyelenggaraan konferensi, simposium, dan seminar (Anita et al., 2021)

Secara keseluruhan, diaspora Indonesia di Malaysia dan para dosen Indonesia di sana bekerja sama untuk mengoordinasikan proyek-proyek layanan masyarakat dan program-program pendidikan. Sebagai hasil dari keterlibatan masyarakat dalam masalah-masalah kemanusiaan ini, Pusat Komunitas Indonesia (ICC) didirikan dengan bantuan para pemimpin masyarakat dari Malaysia dan diaspora Indonesia (Dewi, 2018)

Kolaborasi antara pemerintah, para profesional, dan diaspora Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan diplomatik yang menyatukan semua bagian negara dapat memecahkan masalah secara lebih efektif dan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini khususnya berlaku bagi mahasiswa

Indonesia di Malaysia dan pekerja migran beserta keluarga mereka.

Sederhananya, cabang diplomasi ini bertujuan untuk memajukan kepentingan suatu negara dengan memahami, mendidik, dan membujuk khalayak internasional. Keterlibatan masyarakat memiliki tujuan yang lebih dari sekadar meningkatkan citra suatu negara. Selain itu, hal ini dapat menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan pemerintah dan memfasilitasi komunikasi dan pemahaman yang lebih baik di antara para pelaku internasional, yang semuanya dapat mengurangi atau menghilangkan perselisihan.

Kegiatan PKM ini bertujuan dapat membangun hubungan kerjasama antar Indonesia-Malaysia dan sangat penting untuk menjaga negara-negara tetap terhubung dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan sumber daya, khususnya di bidang pendidikan. Menurut Prof. Dr. Salawati Binti Mat Basir perwakilan Fakultas Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia (Pakar Hukum Internasional), langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dan Malaysia untuk mendorong kerja sama Pendidikan antara lain:

1. Program di mana mahasiswa, guru, dan dosen dari negara lain dapat berinteraksi satu sama lain dan berbagi pengalaman serta budaya mereka.
2. Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam program magang.
3. Program untuk pendidikan pendidik.
4. Dan lain-lain
- 5.



## **Kesimpulan**

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam rangka membangun dan mempererat hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia melalui kerjasama pendidikan, yaitu terlibat dalam upaya diplomatik dan kerja sama dengan pemerintah Malaysia mengenai program pendidikan dan kunjungan kenegaraan, berkolaborasi dengan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan dosen-dosen Indonesia yang mengajar di Malaysia. Sarana potensial untuk mewujudkan kemitraan ini meliputi penyelenggaraan magang bagi mahasiswa, pelaksanaan program pelatihan guru, pertukaran mahasiswa, guru, dan dosen antara kedua negara.

## **Daftar Pustaka**

- Anita, Darwita, & Bahaudin, A. (2021). Kerjasama Indonesia Malaysia Dalam Pendidikan Anak Tki Di Sabah. *Hasanudin Journal of International Affairs*, 1(2), 193–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/hjirs.v1i2.17737>
- Cipto, B. (2007). *Hubungan internasional di Asia*

*Tenggara: teropong terhadap dinamika, realitas, dan masa depan.*

Pustaka Pelajar.

Dewi, U. N. M. (2018). *Permasalahan Dan Solusi Hak Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Studi Kasus Di Negeri Johor Dan Negeri Pahang, Malaysia* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta].  
<https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22327>

Ghofar, M. (2015). *Kemendikbud: Wajib Belajar 12 Tahun dimulai 2016*. Antara Kantor Berita Indonesia.

[https://www.antaraneews.com/berita/503076/kemendikbud-wajib-belajar-12-tahun-dimulai-2016#google\\_vignette](https://www.antaraneews.com/berita/503076/kemendikbud-wajib-belajar-12-tahun-dimulai-2016#google_vignette)

Maksum, A. (2017). Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 3(1), 1.  
<https://doi.org/10.22219/sospol.v3i1.4398>

Suardi, M. (2016). *Sosiologi Pendidikan*. Parama Ilmu.

*Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (2003).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>